

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Dika Lidyana
14.0102.0013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Dika Lidyana
14.0102.0013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dika Lidyana

NPM 14.0102.0013

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Nook Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Kelda

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Wawan Sadiya N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 17 OCT 2018

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dika Lidyana

NIM : 14.0102.0013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)

Adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan



Dika Lidyana

NIM. 14.0102.0013

RIWAYAT HIDUP

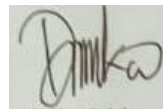
Nama : Dika Lidyana
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 06 Februari 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Kedunglo RT 03 RW 03, Gandulan, Kaloran,
Temanggung
Alamat Email : lidyanadika@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2000-2006) : SD Negeri 1 Gandulan
SMP (2006-2009) : SMP Negeri 1 Kaloran
SMA (2009-2012) : SMK Negeri 2 Temanggung
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 20 Agustus 2018

Peneliti



Dika Lidyana

NIM. 14.0102.0013

MOTTO

“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.”
(QS. Al Baqarah ayat 282)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Asy Syarh ayat 5-6)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

“Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan”
(William Cowper)

“Antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras”
(Merry Riana)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Farida S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga sampai terlaksananya sidang skripsi.
5. Ibu Faqiatul Mariya Waharini S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah bersedia meluangkan waktu,

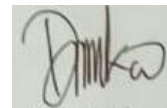
memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga sampai terlaksananya sidang skripsi.

6. Dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
7. Bapak, Ibu dan Adik saya tercinta yang selalu memberikan perhatian, doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh sahabat tercinta akuntansi angkatan 2014 yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Wassalamu'alailum Wr. Wb.

Magelang, 20 Agustus 2018

Peneliti



Dika Lidyana

NIM.14.0102.0013

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori.....	15
1. <i>Goal Setting Theory</i>	15
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17
3. Penganggaran berbasis Kinerja	19
4. Ketaatan pada Peraturan Perundangan	21
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	22
6. Pengendalian Akuntansi	23
7. Kompetensi Aparatur.....	24
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	25

C. Perumusan Hipotesis	28
1. Pengaruh Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	28
2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31
4. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	32
5. Pengaruh Interaksi antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	34
6. Pengaruh Interaksi antara Pengendalian Akuntansi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35
7. Pengaruh Interaksi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37
8. Pengaruh Interaksi antara Kompetensi Aparatur Pemerintah dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	39
D. Model Penelitian	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel	42
B. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	43
C. Metode Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sampel Penelitian	54
B. Statistik Deskriptif Responden	54

C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	55
D. Uji Kualitas Data	59
E. <i>Moderated Regression Analysis</i>	62
F. Uji Hipotesis	65
G. Pembahasan	72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	93
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Opini BPK.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	54
Tabel 4.2	Profil Responden.....	55
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.4	Uji Validitas	59
Tabel 4.5	<i>Cross Loading</i>	59
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.7	Uji Regresi	63
Tabel 4.8	Uji R^2	65
Tabel 4.9	Uji F	65
Tabel 4.10	Uji t	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	41
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	50
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t	51
Gambar 4.1 Hasil Penerimaan Uji F	66
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t variabel Ketaatan padaperaturan perundangan...	67
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t variabel Pengendalian Akuntansi	68
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	68
Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji t variabel Kompetensi Aparatur.....	69
Gambar 4.6 Nilai Kritis Uji t interaksi variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja	70
Gambar 4.7 Nilai Kritis Uji t interaksi variabel Pengendalian Akuntansi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja	70
Gambar 4.8 Nilai Kritis Uji t interaksi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja.....	71
Gambar 4.9 Nilai Kritis Uji t interaksi variabel Kompetensi Aparatur dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Riset.....	93
Lampiran 2	Bukti Riset.....	94
Lampiran 3	Kuesioner.....	100
Lampiran 4	Tabulasi Data Pengisian Kuisisioner	110
Lampiran 5	Penyebaran Kuesioner	128
Lampiran 6	Statistik Deskriptif.....	129
Lampiran 7	Uji Validitas.....	130
Lampiran 8	Uji Reliabilitas.....	140
Lampiran 9	Analisis Regresi Linier Berganda.....	142
Lampiran 10	Hasil Uji Validitas	143
Lampiran 11	Tabel F.....	145
Lampiran 12	Tabel t.....	148

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Temanggung)

Oleh:

Dika Lidyana
14.0102.0013

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini adalah OPD Kabupaten Temanggung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 94 responden. Uji hipotesis dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: Ketaatan pada peraturan perundangan, Pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan anggaran berbasis kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Arifiyadi (2008), akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didorong oleh suatu kebutuhan akan adanya akuntabilitas dan transparansi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi bukti lahirnya sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional. Dalam undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan. Salah satu pendekatan baru dalam implementasi perencanaan dan penganggaran yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Konsep PBK sendiri menuntut adanya hubungan erat antara anggaran dengan kinerja yang diharapkan, maka dari itu setiap unit organisasi pemerintah daerah harus

mempunyai rumusan kinerja yang ingin dicapai serta menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun, (Mulyadi, 2011). Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran dengan metode tradisional tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya. Penganggaran dengan metode ini tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak, yang dijadikan tolok ukur keberhasilan hanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundangan-undangan. Manan & Magnar (1987) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Dengan adanya ketaatan terhadap peraturan perundangan diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaporkan tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan informasi publik.

Teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat (Fauzi, 2008). Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman membuat teknologi yang semakin canggih, kebutuhan masyarakat akan informasi meningkat pula. Hal ini di respon pemerintah dengan mendesain website pemerintah sehingga masyarakat bisa mengakses semua informasi berkenaan dengan pemerintahan. Penggunaan Teknologi Informasi dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan agar tujuan yang telah direncanakan tercapai. Pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sistem pengendalian akuntansi dimana informasi digunakan sebagai sistem formal untuk menjaga dan mengubah pola aktivitas organisasi. Yang termasuk pengendalian akuntansi dalam hal ini adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan sistem evaluasi yang didasarkan pada informasi. Tujuan pemakaian informasi akuntansi dapat meningkatkan penilaian dan pengambilan keputusan yang baik, mengontrol kegiatan-kegiatan dengan lebih efektif, efisien, dan ekonomis sehingga sasaran tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Kompetensi kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga kompetensi diperlukan aparatur pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama dalam hal merumuskan rencana strategis dan perjanjian kinerja. Kompetensi aparatur pemerintah yang memadai dapat meningkatkan kinerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Jika Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diterapkan dengan baik pada suatu instansi maka akan memperkuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik. Hal tersebut menyebabkan menguatnya pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan

teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 1.1

**Opini BPK terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten dan Kota se –Jawa Tengah**

No.	Entitas	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Prov. Jawa Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
5	Kab. Blora	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab. Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
10	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Karanganyar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Kebumen	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
14	Kab. Kendal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
15	Kab. Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
16	Kab. Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
18	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
19	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
20	Kab. Pemalang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
21	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
22	Kab. Purworejo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kab. Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
26	Kab. Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
27	Kab. Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
28	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
30	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
31	Koota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
32	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
33	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
34	Kota Semarang	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP

Table 1
Opini BPK terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten dan Kota se –Jawa Tengah
(Lanjutan)

No.	Entitas	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
35	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : www.bpk.go.id

Bersumber dari hasil audit BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Temanggung selama 2012-2016 selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada OPD Kabupaten Temanggung yang selama 5 tahun terakhir mendapatkan opini WTP yang artinya OPD Kabupaten Temanggung sudah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2016 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya, dengan angka rata-rata 97,7% tercapai atau dengan kategori “sangat baik”. Namun demikian masih ada beberapa program yang belum tercapai seratus persen yaitu antara lain program mewujudkan Peningkatan pelaksanaan Pemerintah yang bersih, transparan, tidak KKN, dan Berorientasi pada pelayanan publik dengan pencapaian sebesar 98,1% (belum tercapai 100%). Evaluasi sasaran program yang belum tercapai seratus persen, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan tindak lanjut dengan membangun e-SAKIP dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja OPD dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Dengan diadakannya e-SAKIP menuntut kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk dapat mengoperasikannya agar informasi dapat diterima dengan cepat oleh para pengguna yang berkepentingan seperti, pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah dan departemen lainnya (temanggung.kab.go.id).

Penelitian sebelumnya yang telah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satunya penelitian yang dilakukan (Fauzan, 2017) menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntabilitas keuangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian (Razi, 2017) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyawan (2017) menunjukkan hasil bahwa Kejelasan Sasaran, Pengendalian akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan interaksi antara Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Kinerja Manajerial berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Fatmala (2014) hasilnya bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sejalan

dengan penelitian Sari (2011) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Wibisono (2010) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Anggaran berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang baik maka pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat. Penelitian Friska, (2014) hasilnya menunjukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan. Tetapi hanya implementasi anggaran dan pelaporan anggaran yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi variabel independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Endrayani, Adiputra, & Darmawan (2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nasikin (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Razi (2017) menyatakan hasil bahwa

Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas sedangkan penelitian Anjarwati (2012) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penelitian Claara (2015) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mubaraq (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lumenta, Morasa, & Mawikere (2016) menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian Razi (2017) tersebut menjadi dasar penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah **pertama** variable Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Penambahan variabel tersebut karena Penerapan Anggaran berbasis Kinerja dalam pelaksanaannya memperhatikan antara *input* dan *outcame* sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Penerapan anggaran berbasis kinerja jika diterapkan dengan baik dapat menjadi pengaruh yang memperkuat hubungan antara ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu; (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM; dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budget*).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK. Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan (depkeu.go.id). Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini sebagai variabel moderating yaitu dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penerapan anggaran berbasis kinerja mempertimbangkan penerapan anggaran dengan kinerja yang dilakukan sedangkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan adanya kinerja yang baik dalam mengelola keuangan negara.

Kedua, adanya perbedaan objek penelitian dimana sebelumnya dilakukan di Indragiri Hulu sedangkan penelitian ini menjadikan OPD Kabupaten

Temanggung sebagai objeknya. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung karena kurang efektifnya serapan anggaran di OPD Kabupaten Temanggung dengan dibuktikan serapan anggaran yang seharusnya melebihi 90%, namun hingga Desember 2017 ternyata hanya terserap 54% (temanggung.kab.go.id). Kabupaten Temanggung mendapat opini WTP selama 5 tahun terakhir yang artinya di Kabupaten Temanggung sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP maka pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi menarik karena serapan anggaran yang belum efektif namun mendapat opini WTP. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan akan membangun sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Bagaimana pengaruh Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
5. Bagaimana pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Untuk menganalisis pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat untuk mengetahui faktor –faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumbang saran bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketaatan peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Goal Setting Theory (Locke, 1968) merupakan salah satu bentuk teori motivasi. *Goal Setting Theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. *Goal Setting Theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins & Judge, 2008). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu.

Secara keseluruhan, niat dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan, merupakan motivasi yang kuat dalam mewujudkan kinerjanya. Individu harus mempunyai keterampilan, mempunyai tujuan dan menerima umpan balik untuk menilai kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh terhadap perilaku pegawai dan kinerja dalam organisasi.

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara tujuan dan usaha yang dilakukan. Akuntabilitas menjadi tujuan dilakukannya suatu pekerjaan, dimana usaha untuk mencapai Akuntabilitas tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah. Tujuan yang sulit ketika diterima justru akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah.

Hubungan antara teori penetapan tujuan dengan penelitian ini adalah akuntabilitas merupakan salah satu hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Hubungan akuntabilitas dapat mempengaruhi individu untuk memilih strategi sebagai persyaratan untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kinerjanya secara kompleks dan akuntabel. Setiap instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas sebagai tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Instansi Pemerintah sebagai pemenuhan tuntutan publik, maka Pimpinan setiap Instansi pemerintah akan melakukan upaya-upaya yang dapat mewujudkan Akuntabilitas. Hal tersebut tentu akan meningkatkan Kinerja individu yang berkaitan.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Keuangan

Instruksi presiden No 7 tahun 1999 memberikan pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 200/201, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinanya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran

(*output*), proses (*proces*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

- a. *Input* yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
- b. *Output* adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
- c. *Outcome* adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
- d. *Benefit* yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah daerah dari hasil.
- e. *Impact* adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara

- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
 - c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
 - d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
 - e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
 - f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Penganggaran berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Halim, 2007).

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan

umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- b. Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

- c. Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
- d. Efisiensi dan Efektifitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.
- e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/ outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

4. Ketaatan pada Peraturan

Keuangan negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat

pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Menurut Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang –Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Masalah kepatuhan hukum merupakan proses internalisasi dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pada dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi (O'Brien, 2006). Menurut Aji (2005) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Pemanfaatan atau

implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi. Dengan adanya teknologi informasi, maka produktivitas suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat. Teknologi informasi yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja merupakan teknologi yang dapat diterapkan dengan mudah.

Teknologi informasi yang berbasis komputer sangat berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan perlu alat yang dapat memproses data secara tepat dan akurat. Di era yang sekarang ini yang sudah globalisasi, teknologi yang ada saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan daritahun ketahun. Untuk itu, dirasakan perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur pemerintah dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

6. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2011). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan

sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Pengendalian Akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi – transaksi keuangan (penerimaan dan pengeluaran). Pengendalian akuntansi berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, karena setiap kegiatan harus dimonitoring sejauh apa kegiatan tersebut berjalan, berapa penyerapan dana untuk suatu kegiatan dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

7. Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (Togatorop, 2011). Menurut Rudana (2005) Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
Fauzan	2017	Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Variabel Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Wibisono	2016	Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pengaruh Penerapan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
Sembiring	2016	Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variable Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara bersama –sama terhadap akuntabilitas instansi pemerintah
Razi	2017	Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja	Variable ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah Variable pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Variable Pengendalian Akuntansi dan Variabel Kompetensi Aparatur pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja isnatansi pemerintah

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu
 (Lanjutan)

Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
Setyawan	2017	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderating	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan pada peraturan Perundangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interaksi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja Manajerial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interaksi antara Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Manajerial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interaksi antara Ketaatan pada peraturan Perundangan dan Kinerja Manajerial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Endrayani dkk	2014	Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Mubaraq	2017	Pengaruh ketaatan pada perundang-undangan, Pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi Aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu
 (Lanjutan)

Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
Lumenta dkk	2016	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan. Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
Friska	2014	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating	Penerapan anggaran berbasis kinerja memang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Anjarwati	2012	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber: Penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Soleman, 2007).

Goal Setting Theory mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins & Judge, 2008). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu.

Berdasarkan teori penetapan tujuan, digambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan dan kinerja. Penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan kinerja, yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja.

Razi (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Setyawan (2017) menyatakan bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketaatan pada peraturan perundangan diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya ketaatan, laporan keuangan daerah dapat dilaporkan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan penelitian oleh Razi (2017) dan Setiawan (2013) dapat disimpulkan bahwa apabila ketaatan pada peraturan perundangan semakin meningkat maka pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat pula.

Pelaksanaan Akuntabilitas harus didukung oleh peraturan perundangan yang memadai seperti penerapan *reward system* dan *punishment* yang konsisten dan memperbaiki format laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada peraturan perundangan yang semakin baik dan taat akan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis.

H₁: Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan yang tidak memuaskan.

Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja (*performance*) dengan penggunaan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistic, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan (Setyawan, 2017).

Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsenkuensi kinerjanya. Dengan menggunakan pendekatan *goal setting theory*, kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya.

Fathia (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Setiawan (2013) menunjukkan hasil bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Apabila Pengendalian Akuntansi meningkatkan Pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan semakin meningkat pula.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap unit organisasi pemerintah, dimana Pengendalian

Akuntansi merupakan control untuk memantau sejauh mana tujuan tercapai dan berapa penyerapan dana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui pengukuran kinerja dengan penggunaan catatan pertanggung jawaban dan laporan-laporan akuntansi, pemimpin organisasi dapat mengarahkan kegiatan organisasi demi tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis:

H₂: Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi computer atau website. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan penggunaan TI dari karyawan suatu organisasi (Nasir & Oktari, 2011).

Teori penetapan tujuan berasumsi bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran, hal tersebut paling besar kemungkinan untuk terjadi bila sasaran itu ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. Namun menurut Robbins

& Judge (2008) dalam kasus lain, individu justru akan memiliki kinerja terbaik jika ditugasi oleh atasannya.

Sari (2015) menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Razi (2017) mengemukakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan cara dan sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membantu penyampaian Informasi dengan cepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan pelaporan hasil kerja sehingga tercapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik. Ketika pemanfaatan Teknologi Informasi semakin meningkat maka akan semakin meningkat pula tercapainya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani

suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Kompetensi aparatur Pemerintah daerah memungkinkan untuk tercapainya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan efektif, ini berarti sumber daya yang digunakan harus konsisten dan berkompeten dibidangnya (Ainsworth, Smith, & Millership, 2007).

Goal Setting Theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu.

Razi (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Apabila kompetensi aparatur pemerintah daerah naik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan tercapai lebih meningkat.

Kompetensi Aparatur Pemerintah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparatur yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini sangat penting berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Dengan kompetensi Aparatur Pemerintah yang memadai maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis:

H₄: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Pengaruh Interaksi antara Ketaatan pada peraturan Perundangan dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan evaluasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan *output/outcomes* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program (Friska, 2014).

Filsafat hukum mencoba dasar kekuatan mengikat daripada hukum itu disebabkan oleh aturan hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau masyarakat mengakuinya karena aturan tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup didalam masyarakat (Putri, 2015)

Orang telah menentukan goal atas perilakunya di masa depan dan *goal* tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya terjadi. Perilakunya akan diatur oleh ide (pemikiran) dan niatnya sehingga akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya. Umumnya manajer menerima penetapan tujuan sebagai hal yang sangat berarti untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja.

Wibisono (2010) menyatakan hasil bahwa Penerapan Anggaran berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penelitian Setyawan (2017) didapatkan hasil bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Aturan Hukum yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang bertujuan untuk mengatur suatu negara. Penerapan Anggaran berbasis Kinerja merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mentaati peraturan perundangan diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai. Oleh karena itu apabila ketaatan pada peraturan perundangan dapat tercermin jika penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik untuk mencapai akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan Hipotesis:

H₅: Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan dimoderasi Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

6. Pengaruh Interaksi antara Pengendalian Akuntansi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategik yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategik daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan strategik tersebut

telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif, ekonomis dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan *performance-based budgeting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (Wibisono, 2010).

Pengendalian yang efektif meluas sampai pada setiap operasi perusahaan, termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah (Fathia, 2017).

Goal Setting Theory menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

Wibisono (2010) menyatakan hasil bahwa Penerapan Anggaran berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Setyawan (2017) menunjukkan hasil bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan Anggaran berbasis kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian untuk lebih menekankan suatu kegiatan berorientasi pada

tujuan sehingga dapat mengurangi pemborosan biaya dan waktu. Apabila penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik maka pengendalian akuntansi akan semakin meningkat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan tercapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis:

H₆: Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

7. Pengaruh Interaksi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output (Mardiasmo, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya: pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi (Sari, 2015).

Goal Setting Theory menyatakan bahwa tujuan sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Berdasarkan teori penetapan tujuan, digambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan dan kinerja.

Penelitian Sembiring (2016) menyatakan hasil bahwa Penerapan Anggaran berbasis Kinerja berpengaruh secara bersama –sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Razi (2017) didapatkan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan Anggaran berbasis Kinerja dapat digunakan sebagai motivasi untuk lebih dapat menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memudahkan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat maka dapat membantu dalam pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan Hipotesis:

H₇: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

8. Pengaruh Interaksi antara Kompetensi Aparatur Pemerintah dengan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PP nomor 58 tahun 2018 tentang Keuangan Daerah menyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap input yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (*line-item & incremental budget*) tetapi berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap produktifnya. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para birokrat selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan birokrasi di pemerintahan dan mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas (Wardhana, Rasmini, & Astika, 2015).

Goal Setting Theory menyatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Teori penetapan tujuan menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan dan kinerja. Penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur

hasilnya akan dapat meningkatkan kinerja, yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja.

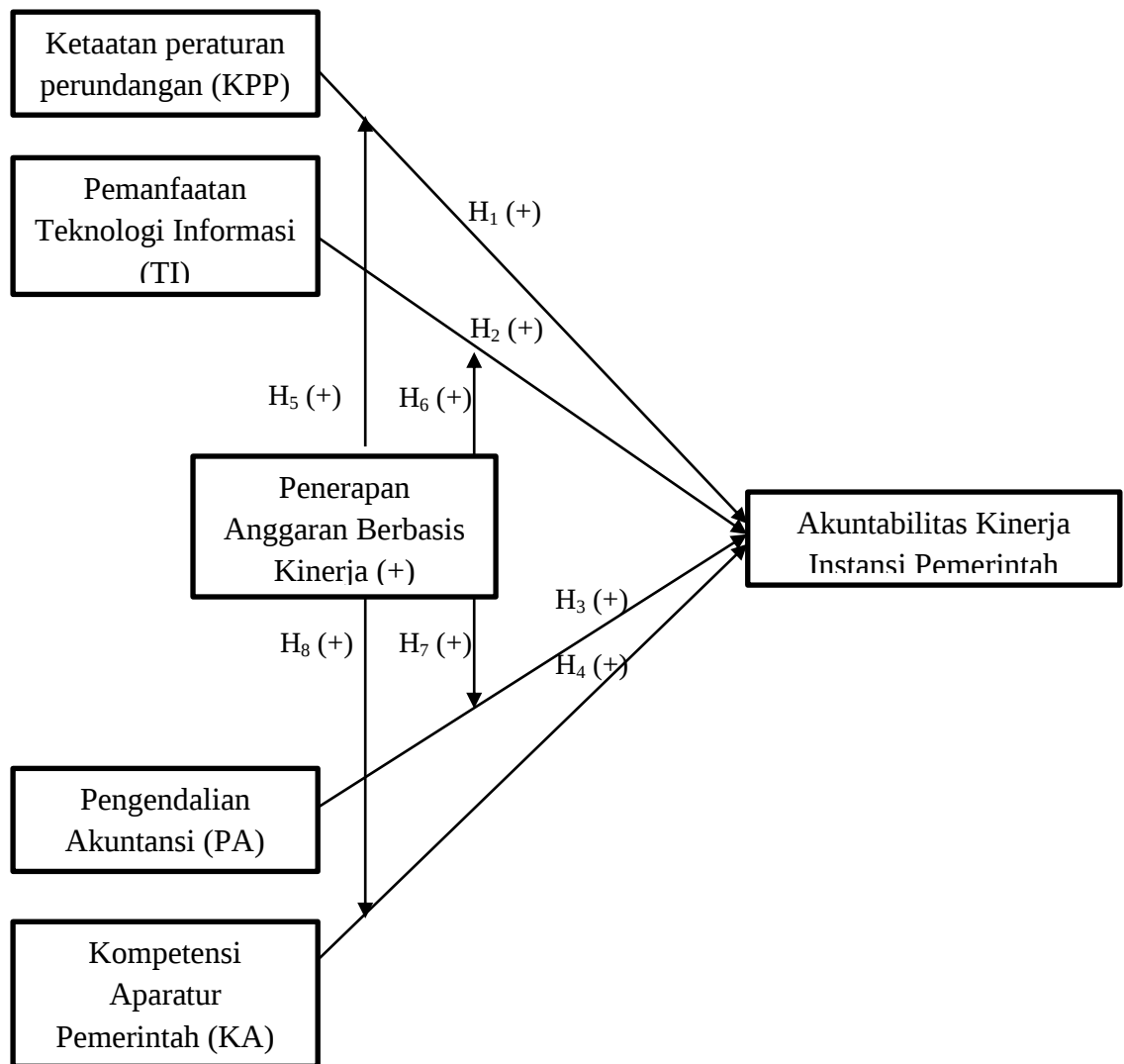
Razi (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Wibisono (2010) menyatakan hasil bahwa Penerapan Anggaran berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya kompetensi aparatur pemerintah yang memadai untuk dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Kompetensi aparatur pemerintah akan meningkat jika tujuan suatu kegiatan dapat diterima oleh individu yang bersangkutan. Dalam hal ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tujuan yang harus dicapai sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja sangat mempengaruhi meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan akintabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan Hipotesis:

H₈: Kompetensi Aparat Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

D. Model Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan diatas, maka dibuat kerangka konseptual untuk mempermudah hubungan antar variabel dan alur penelitian dengan model berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* karena responden yang dipilih hanya berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Kabupaten Temanggung dengan syarat:

1. Pejabat yang menduduki jabatan pada level eselon III dan IV yang sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen, karena pejabat tersebut sebagai pejabat yang mempunyai kegiatan dalam penganggaran, mereka berperan dalam proses penyusunan anggaran sebagai wakil dari unit kerja yang menjadi tanggung jawab mereka.
2. Lama bekerja pejabat lebih dari 2 tahun karena pejabat yang sudah menjabat lebih dari dua tahun dianggap sudah mengetahui sistem anggaran yang ada di tempat kerjanya.
3. Sampel penelitian terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bagian dan kepala sub bagian dari setiap OPD, dan sub unit kerja di lingkungan OPD yang memiliki fungsi manajerial.

B. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Akuntabilitas kinerja adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner dari penelitian Sari (2011). Instrumen 10 butir pernyataan dengan indikator 4 aspek pengukuran kinerja dan 6 aspek pelaporan.

2. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Razi, 2017). Instrumen penelitian untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Fatmala (2014). Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 2 aspek sikap terhadap peraturan perundangan dan 3 aspek pemahaman pembuatan laporan keuangan berdasarkan peraturan yang ada.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik bersifat finansial maupun non finansial. Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk memperbaiki performa individu dan organisasi, karenanya banyak pengambil keputusan menginvestasikan dana untuk teknologi informasi. Tetapi harus disadari bahwa investasi di bidang teknologi informasi membutuhkan dana yang besar (Rahmawati, 2008). Instrumen penelitian untuk variabel ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Nasikin (2017). Instrumen 8 butir pernyataan dengan indikator 1 aspek tentang penerapan sistem akuntansi dan 7 aspek tentang ketersediaan sarana dan prasarana.

4. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi menurut Mulyadi (2008) dalam (Fauzan, 2017) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Instrumen penelitian untuk menguji variabel Pengendalian Akuntansi menggunakan kuisisioner dari penelitian Sari (2011). Instrumen 10 butir pernyataan dengan indikator 5 aspek tentang

pemahaman prosedur akuntansi dan 5 aspek tentang pemisahan tugas dan tanggung jawab oleh pihak yang berwenang.

5. Kompetensi Aparatur Pemerintah

Menurut Warisono (2008) dalam (Astari, 2018) mengungkapkan bahwa Pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang baik dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Instrumen penelitian untuk menguji Kompetensi Aparatur Pemerintah menggunakan kuisioner dari penelitian Nasikin (2017). Instrumen 7 butir pernyataan dengan indikator 6 aspek tentang kemampuan individu dalam bekerja dan 1 aspek tentang pelatihan untuk pengembangan keahlian.

6. Penerapan Anggaran berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis Kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dengan *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan adalah sama dengan *input* yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu

disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur juga penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif (Sari, 2015). Instrumen penelitian untuk menguji Penerapan Anggaran berbasis Kinerja menggunakan kuisioner dari penelitian Friska (2014). Instrumen 19 pernyataan dengan indikator 10 aspek perencanaan, 3 aspek implementasi, 3 aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, dan 3 aspek tentang evaluasi.

C. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, mean, median, dan standar deviasi yang disajikan dalam tabel numerik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:53). Pengukuran

validitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan cara Confirmatory Factor Analysis (CFA) yaitu untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk atau variabel maka akan memiliki nilai loading factor yang tinggi (Ghozali, 2016:53). Alasan penggunaan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) adalah karena memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan person correlation yaitu kemampuannya untuk menghasilkan faktor yang terbebas dari korelasi yang muncul diantara variabel yang diteliti dengan indikator variabel.

Asumsi yang mendasari digunakannya analisis faktor adalah suatu data matrik harus memiliki korelasi yang cukup. Uji *Barlett of Sphericity* digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel, maka *Barlett Test* akan semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai MSA ini bervariasi dari 0 sampai 1 dan cross loading $> 0,5$ dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016:53):

- 1) $MSA > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.

- 2) $MSA < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki *cronbach alpha* $\geq 0,6$ (Sekaran, 2007)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen Ketaatan pada peraturan Perundangan (KPP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Pengendalian Akuntansi (PA), dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (KA) dan variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan Variabel Moderating Penerapan Anggaran berbasis Kinerja (ABK). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Regresi linier berganda bertujuan

untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

$$\text{Model } Y = \alpha + \beta_1 \text{KPP} + \beta_2 \text{TI} + \beta_3 \text{PA} + \beta_4 \text{KA} + \beta_5 \text{KP} * \text{ABK} + \beta_6 \text{TI} * \text{ABK} + \beta_7 \text{PA} * \text{ABK} + \beta_8 \text{KA} * \text{ABK} + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

KPP : Ketaatan pada Peraturan Perundangan

TI : Pemanfaatan Teknologi Informasi

PA : Pengendalian Akuntansi

KA : Kompetensi Aparat Pemerintah

ABK : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

e : *Error Term*

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel

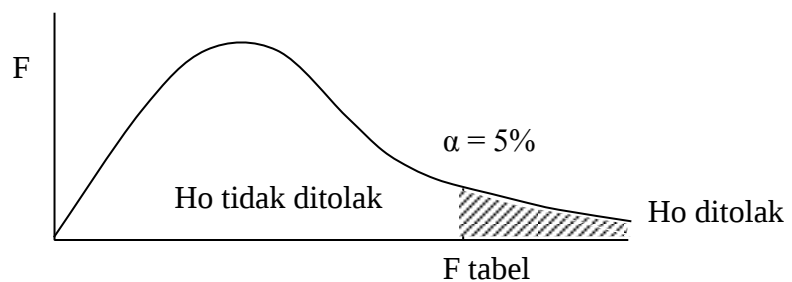
dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen.

b. Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Suliyanto (2011:53) nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*) apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak.

Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (*tidak fit*)

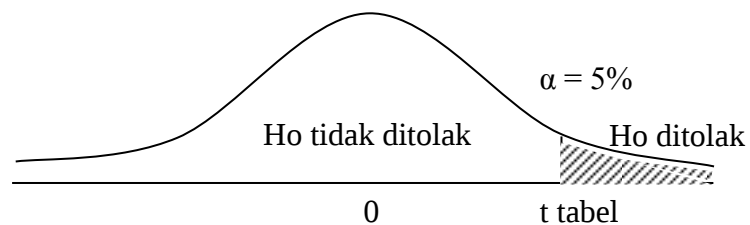


Gambar 3.1
Penerimaan Uji f

c. Uji t

Menurut Suliyanto (2011:53), nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai T hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel. *Level of significants* pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df = n-1$. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya secara statistik data yang ada tidak dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

d. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Uji Interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Uji interaksi ini dilakukan dengan mengalikan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Jika variabel hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar benar memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung (Suliyanto, 2011:205). Analisis regresi dengan metode interaksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meregresikan variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y), diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon \quad (a)$$

- 2) Meregresikan variabel bebas (X) dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) terhadap variabel tergantung (Y), diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \varepsilon \quad (b)$$

- 3) Mengalikan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel bebas (X) dengan variabel moderasi (Z) menjadi variabel interaksi

- 4) Meregresikan variabel bebas (X), variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi (Z) dan variabel interaksi (XZ) terhadap variabel tergantung (Y)

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + \varepsilon \quad (c)$$

- 5) Menarik kesimpulan uji moderasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika pada persamaan (b), β_2 tidak signifikan ($\beta_2 = 0$) dan persamaan (c), β_3 juga tidak signifikan ($\beta_3 = 0$),

maka Z bukan merupakan variabel moderator, tetapi hanya sebagai variabel bebas saja.

- b) Jika pada persamaan (b), β_2 signifikan ($\beta_2 \neq 0$) dan Z pada persamaan (c), β_3 signifikan ($\beta_3 \neq 0$), maka Z merupakan variabel quasi moderator.
- c) Jika pada persamaan (b), β_2 tidak signifikan ($\beta_2 = 0$) dan Z pada persamaan (c), β_3 signifikan ($\beta_3 \neq 0$), atau justru sebaliknya maka Z merupakan variabel pure moderator.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel moderating pada OPD Kabupaten Temanggung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 94 pegawai di OPD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik ketaatan pada peraturan perundangan, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Temanggung, artinya semakin pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak dapat digunakan sebagai variabel moderating, hanya berpengaruh sebagai variabel independen.

B. Keterbatasan

Hasil analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang sebaiknya menjadikan perhatian dan disarankan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya pegawai pada OPD Kabupaten Temanggung sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasikan lebih luas.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan cukup erat untuk berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti variabel sistem pelaporan kinerja (Fathia, 2017).
2. Dapat mempertimbangkan untuk menambah ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan mengambil sampel dari OPD se-karesidenan Kedu sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, M., Smith, N., & Millership, A. (2007). *Managing Performance Managing People*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Aji, S. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Arifiyadi, T. (2008). *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Claura, A. V. (2015). Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Beng. *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- depkeu.go.id.
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di P. *JOM Fekon*, 4(1), 670–685.
- Fatmala, J. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. Universitas Bengkulu.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin. *JOM Fekon*, 4(1), 1122–1136.
- Fauzi, A. (2008). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Friska, I. Y. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jambi*, 75–81.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah* (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Lan.go.id. Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003.
- Locke, E. (1968). *Toward a Theory of Tasks Motivation and Incentives*. American Institutes for Reaserch.
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KABUPATEN MINAHASA SELATAN). *Emba*, 4(2), 768–779.
- Manan, B., & Magnar, K. (1987). *Peranan Peraturan Perundang undangan dalam pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mubaraq, H. (2017). PENGARUH KETAATAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi).
- Mulyadi. (2011). *Sistem Akuntansi* (Edisi Ket). Jakarta: Salemba Empat.
- Nasikin, K. M. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(2). Retrieved from <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/803>
- O'Brien, J. A. (2006). *Introducing To Information System*,. Jakarta: Salemba Empat.

- Putri, E. M. N. (2015). Influence of Competence of the Local Government Reform, Applications of Financial Accountability, Utilization of Information Technology, Adherences to Laws, performance of Local Government Agencies. *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- Rahmawati, D. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 N(1996), 107–118. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/viewFile/606/463>
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 1268–1281.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang*. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Robbins, S., & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar.
- Sari, E. K. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–14.
- Sari, F. A. (2011). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
- Sekaran, U. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, R. A. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, (1).
- Setiawan, E. K. O. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (33), 1–14.

- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, 4, 251–264.
- Soleman, R. (2007). Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Disertasi*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: teori dan aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Temanggung.kab.go.id.
- Togatorop, G. T. (2011). Pengaruh Kompetensi sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Kerja Karyawan Carrefour Citra Garden Padang Bulan Medan, 26–43.
- Wardhana, G. A. S., Rasmini, K. N., & Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4.09, 9, 571–598.
- Wibisono, S. (2010). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ISSN : 2460-0585*, 5(September).

